

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Reformasi keuangan pemerintah yang dilaksanakan pada awal tahun 2000 berdampak pada tuntutan masyarakat akan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih dan baik (good government goverance) mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Menurut Mahmudi, Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah (agen) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal)¹. Paradigma ini juga mewajibkan pemerintah daerah daerah untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparan kepada publik dengan membuat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas harus memenuhi standart akuntansi pemerintah (PP No. 71 tahun 2010) sehingga laporan keuagan yang dibuat dapat memberi informasi yang berguna bagi penggunanya, diantaranya harus memiliki nilai dan kualitas sehingga dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh penggunanya.

¹ Mahmudi (2010)

Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut setidaknya-tidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang baik dan berkualitas akan dapat memberi manfaat bagi pemerintah dalam upaya mengambil kebijakan dimasa yang akan datang. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari hasil audit Badan Pemeriksa keuangan, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak menyatakan pendapat (TMP). Kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat dari apakah sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan standart akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Instansi pemerintah mulai tahun 2015 harus menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi yang berbasis akrual (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dan didukung dengan ditetapkannya Permendagri No. 64 tahun 2013). Laporan keuangan berbasis akrual memerlukan sistem akuntansi, Sistem akuntansi keuangan daerah dibutuhkan untuk mengelola iformasi akuntansi pemerintah daerah yang akan nantinya mampu memberikan *output* data berupa laporan keuangan daerah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 35 menjelaskan

bahwa “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik Laporan Keuangan ada empat, yaitu: Relevan (apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu), Andal (Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi), dapat dibandingkan (Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal), dan dapat dipahami (Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.). Sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang baik harus memenuhi empat karakteristik laporan keuangan sesuai PP No. 71 Tahun 2010 agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam standar akuntansi pemerintahan mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga SAP merupakan prasyarat serta menjadi pedoman yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan di Indonesia.

Perubahan SAP pada PP No. 24 tahun 2005 menjadi PP No. 71 tahun 2010 yaitu pada basis kas menuju akrual menjadi basis penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah. Isu pokok yang muncul adalah buruknya kinerja pengelolaan anggaran daerah. Hal ini dapat diketahui dari semakin sedikitnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan (BPK). Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, pada tahun 2015, jumlah laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini WTP hanya 58 persen atau sebanyak 312 LKPD. Sementara itu, LKPD lainnya tercatat dengan memperoleh opini lain yaitu Wajar dengan pengecualian (WDP) tercatat 187 LKPD, tidak menyatakan pendapat (TMP) ada 30 LKPD, dan tidak wajar (TW) ada 4 LKPD. BPK juga mengungkapkan 10.198 temuan yang memuat 15.568 permasalahan. Sebanyak 51 persen permasalahan adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan tersebut berkaitan dengan penyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak tepat waktu.

Buruknya kinerja akuntabilitas menurut *ethical accountability* dan pengalaman sebelumnya bisa dilihat dari banyaknya dana yang tidak terserap dan banyaknya PEMDA yang menyimpan dananya daripada untuk direalisasikan untuk masyarakatnya. Selain itu, banyaknya alokasi dana yang diperuntukkan bagi

belanja aparatur daripada belanja langsung untuk rakyat menjadi salah satu persoalan yang menyebabkan buruknya kinerja akuntabilitas pemerintah daerah.

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan pertanggungjawaban². Lingkungan eksternal dan internal merupakan lingkungan yang mempengaruhi lingkungan akuntabilitas suatu entitas yang dapat memperkuat, atau memperlemah efektifitas pertanggungjawaban instansi dan tanggungjawab yang dilimpahkan kepadanya. Kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan dapat disusun tepat waktu.

Pemerintah daerah akan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah apabila informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Proses pengelolaan keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. Dalam pengelolaan tersebut akan terlihat dari hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

² Lembaga Administrasi Negara, 2003

Salah satu prinsip strategis yang perlu dikembangkan saat ini adalah prinsip tata kelola keuangan. Penguatan sistem dan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang undangan serta standart penyajian laporan keuangan yang berlaku merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menciptakan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi pemerintah yang menyajikan atau membuat laporan keuangan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih.

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian yang dilakukan adalah “Tinjauan Atas Kesiapan Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (PP No. 71 tahun 2010)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kesiapan implementasi standart akuntansi pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (PP No. 71 Tahun 2010) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan implementasi standart akuntansi pemerintah pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (PP No. 71 Tahun 2010).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi penulis dalam peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah sesuai PP No. 71 Tahun 2010.
2. Sebagai bahan pengetahuan kepada pembaca guna memperoleh informasi mengenai bagaimana Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah sesuai PP No. 71 Tahun 2010.
3. Sebagai referensi bagi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan dan penulis lain yang akan mengadakan penelitian dengan judul yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi didefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan atau ekonomi dari sebuah organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan³. Akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses sistematis pengelolaan keuangan pemerintah mulai dari bukti transaksi sampai ke proses pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban kepada publik.

Revrisond mengatakan bahwa pengertian akuntansi dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu dari segi prosesnya dan dari segi fungsinya. Dari segi prosesnya, akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolong-golongkan, dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan, serta melaporkan hasilnya dalam suatu laporan yang disebut sebagai laporan keuangan. Sedangkan dari segi fungsinya, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan, yang diharapkan dapat

³ Halim dan Kusufi, **Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi**, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hal 36.

digunakan sebagai dasar mengambil keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif tindakan.

Akuntansi pemerintahan merupakan sistem pencatatan dan pembukuan yang dibuat untuk negara. Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, mulai dari anggaran sampai dengan pelaksanaan pelaporannya termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti masjid, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan.

Jadi akuntansi pemerintahan menurut Pramudiana dapat disimpulkan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil dari proses yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.⁴ Akuntansi pemerintah di Indonesia yang berlaku hingga saat ini dikenal dengan sebutan pembukuan kameral/anggaran.

Ruang lingkup dari akuntansi pemerintahan ada dua (Halim dan Kusufi, 2012) yaitu akuntansi pememrintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi pemerintahan daerah juga terdiri atas dua yaitu:

⁴ Pramudiana, Agatha Arne. **Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik**, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2017.

a. Akutansi Pemerintah Provinsi

b. Akuntansi Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Menurut Mentu dan Sondakh (2016) fungsi akuntansi pemerintahan adalah menyediakan laporan yang bermanfaat meliputi aspek kepengurusan administrasi pemerintahan, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Tiga tujuan akuntansi pemerintahan (Halim dan Kusufi, 2012) adalah sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban

Pada dasarnya, tiap pengurusan dan pemberian kepercayaan mengandung unsur tanggungjawab bagi penerima kepercayaan. Tujuan pertanggungjawaban memberi arti memiliki informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah.

b. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

c. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.⁵

2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan atau badan instansi atau instansi pemerintahan pada suatu periode akuntansi, yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangannya. Singkatnya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan dilakukan dalam periode tertentu. Periode akuntansi pencatatan laporan keuangan ditentukan oleh masing-masing perusahaan, ada yang dilakukan setiap akhir tahun dan ada yang dilakukan sekali dalam beberapa bulan. Setiap transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan harus dicatat secara akurat sehingga perhitungan laporan keuangan tepat, karena keuntungan atau kerugian, dan pembayaran pajak perusahaan bergantung dengan laporan keuangan yang disajikan.

Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit dan membingungkan pembacanya, karena laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa

⁵ Halim dan Kusufi, Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hal 39.

lebih berkualitas. Laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Mahmudi,2003).

Menurut SAP No. 71 tahun 2010, dalam PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan paragraf 9, bahwa “Laporan keuangan merupakan organisasi yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.⁶ Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan dengan konsolidasi dari laporan keuangan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan laporan keuangan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Proses pembuatan laporan keuangan daerah dilakukan dengan cara menggabungkan keuangan PPKD.⁷

Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya, tidak mengandung unsur manipulasi, tidak bias dan terbebas dari salah saji material. Selain itu laporan keuangan pemerintahan juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai (*disclosure*) mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Dalam menciptakan *good governance* maka laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan harus transparan.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, **Standar Akuntansi Pemerintahan**, PSAP 01 paragraf 9

⁷ Efrianti, Desi, **Analisis Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Bogor berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan**, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor.

2.3.2 Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan pemerintahan berdasarkan PP No.71 tahun 2010 terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pokok pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk satu periode tertentu.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Peraturan Pemerintah mengenai SAP sebelumnya yaitu PP No. 24 tahun 2005 tidak pernah membuat laporan keuangan LPSAL (Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih). Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.1 : Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Pusat

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7	Lain-lain	XXX	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX	XXX

Sumber : PP No. 71 Tahun 2010

Tabel 2.2 : Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah

PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7	Lain-lain	XXX	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX	XXX

Sumber : PP No. 71 Tahun 2010

c. Neraca

Neraca dalam akuntansi pemerintahan merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu. Basis akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan apakah kas atau setara kas sudah atau belum diterima atau dibayarkan. Unsur yang dicakup oleh neraca pemerintahan terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

Tabel 2.3 : Contoh Format Neraca Pemerintah Pusat

PEMERINTAH PUSAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No.	Uraian	20X1	20X0
-----	--------	------	------

1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Bank Indonesia		
5	Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara		
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Pajak	xxx	xxx
10	Piutang Penerimaan Negara Bukan	xxx	xxx
11	Pajak Penyisihan Piutang	xxx	xxx
12	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan	(xxx)	(xxx)
14	Negara	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan	xxx	xxx
16	Daerah	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga	xxx	xxx
18	Internasional	xxx	xxx
19	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
20	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
21	Piutang Lainnya	xxx	xxx
22	Persediaan	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	xxx	xxx
24	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Dana Bergulir	Xxx	Xxx
26	Investasi dalam Obligasi	Xxx	xxx
27	Investasi dalam Proyek Pembangunan	Xxx	xxx
28	Investasi Nonpermanen Lainnya	Xxx	xxx
29	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 28)	Xxx	xxx
30	Investasi Permanen		
31	Penyertaan Modal Pemerintah	Xxx	xxx
32	Investasi Permanen Lainnya	Xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Permanen (31 s/d 32)	Xxx	xxx
34	Jumlah Investasi Jangka Panjang (29 + 33)	Xxx	xxx
35	ASET TETAP		
36			
37	Tanah	Xxx	xxx
38	Peralatan dan Mesin	Xxx	xxx
39	Gedung dan Bangunan	Xxx	xxx
40	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Xxx	xxx
41	Aset Tetap Lainnya	Xxx	xxx

42	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Xxx	xxx
43	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
44	Jumlah Aset Tetap (37 s/d 43)	Xxx	xxx
45	ASET LAINNYA		
46			
47	Tagihan Penjualan Angsuran	Xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	Xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	Xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	Xxx	xxx
52	Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51)	Xxx	xxx
53	JUMLAH ASET (20+34+44+52)	Xxxx	xxxx
54			
55	KEWAJIBAN		
56			
57	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
58			
59	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Xxx	xxx
60	Utang Bunga	Xxx	xxx
61	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Xxx	xxx
62	Pendapatan Diterima Dimuka	Xxx	xxx
63	Utang Belanja	Xxx	xxx
64	Utang Jangka Pendek Lainnya	Xxx	xxx
65	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (59 s/d 64)	Xxx	xxx
66	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
67			
68	Utang Luar Negeri	Xxx	xxx
69	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	Xxx	xxx
70	Utang Dalam Negeri - Obligasi	Xxx	xxx
71	Premium (Diskonto) Obligasi	Xxx	xxx
72	Utang Jangka Panjang Lainnya	Xxx	xxx
73	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 72)	Xxx	xxx
74	JUMLAH KEWAJIBAN (65+73)	Xxx	xxx
75	EKUITAS		
76			
77	EKUITAS	Xxx	xxx
78	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (74+77)	Xxxx	xxxx

Tabel 2.4 : Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1 2	ASET	xxx	xxx
3		xxx	xxx
4	ASET LANCAR	xxx	xxx
5	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Pajak	(xxx)	(xxx)
10	Piutang Retribusi	xxx	xxx
11	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
12	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	xxx	xxx
17	Lainnya	xxx	xxx
18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
19	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
20	Piutang Lainnya	xxx	xxx
21	Persediaan		
22	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)		
23	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
24	Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
25	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
26	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
27	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
28	Investasi Nonpermanen Lainnya		
	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27)		
29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	Xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)	Xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	Xxx	xxx
34	ASET TETAP		
35			
36	Tanah	xxx	xxx
37	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
38	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx

39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
40	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
42	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
43	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)	xxx	xxx
44	DANA CADANGAN		
45			
46	Dana Cadangan	xxx	xxx
47	Jumlah Dana Cadangan (46)	xxx	xxx
48	ASET LAINNYA		
49			
50	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
51	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
53	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
54	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
55	Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)	xxx	xxx
56	JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)	xxxx	xxxx
57			
58	KEWAJIBAN		
59			
60	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
61			
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
63	Utang Bunga	xxx	xxx
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
65	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
66	Utang Belanja	xxx	xxx
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)	xxx	xxx
69	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
70			
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
73	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
74	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)	xxx	xxx
76	JUMLAH KEWAJIBAN (68+75)	xxx	xxx
77	EKUITAS		
78			
79	EKUITAS	xxx	xxx
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79)	xxxx	xxxx

Sumber : PP No. 71 Tahun 2010

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan laporan operasi, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas umum negara/kas daerah selama periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas keuangan pemerintah sebagian besar merupakan penerimaan dan pengeluaran kas negara/daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.5 : Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
----	--------	------	------

1	EKUITAS AWAL		
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	XXX	XXX
4	KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
5	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
6	SELISIH REVALUASI ASET	XXX	XXX
7	TETAP LAIN-LAIN	XXX	XXX
	EKUITAS AKHIR		

Sumber : PP No. 71 Tahun 2010

Tabel 2.6 : Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Provinsi/Kabupaten/Kota

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL		
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	XXX	XXX
4	KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
5	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
6	SELISIH REVALUASI ASET	XXX	XXX
7	TETAP LAIN-LAIN	XXX	XXX
	EKUITAS AKHIR		

Sumber : PP No. 71 Tahun 2010

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

2.3.3 Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan poin I Umum, paragraf 8 menjelaskan bahwa “laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh”.⁸

Laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Tujuan umum laporan keuangan adalah

⁸ PP 71 tahun 2010 **Standar Akuntansi Pemerintahan** poin I Umum, paragraf 8

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Dalam kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintah, dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah. Tujuan pelaporan keuangan tersebut adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai kegiatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Sesuai dengan paragraf 9 PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan, tujuan umum laporan keuangan adalah “menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”⁹

2.3.4 Pengguna Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok pengguna (*general purposive*), meskipun setiap kelompok memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Dalam kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, antara lain:

a. Masyarakat;

Dalam hal ini masyarakat memiliki kebutuhan informasi sebagai pengguna layanan publik, dan sebagai pembayar pajak serta pemberi bantuan.

Pertama masyarakat sebagai pengguna layanan publik membutuhkan informasi atas kewajaran biaya, harga yang ditetapkan, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Kedua masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, **Standar Akuntansi Pemerintahan**, PSAP 01 paragraf 9

telah mereka berikan. Masyarakat ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan kegiatan anggaran dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan, apakah pajak daerah yang mereka bayarkan telah dibelanjakan untuk kepentingan publik, apakah hak-hak publik untuk mendapatkan pelayanan sudah dipenuhi dengan baik.

- b. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;

DPRD dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah daerah dan penyelewengan keuangan negara.

- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;

Kreditor dan investor membutuhkan informasi keuangan daerah untuk menghitung tingkat risiko berinvestasi, kondisi kesehatan finansial daerah yaitu tingkat likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas daerah.

- d. Pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka laporan keuangan yang disajikan mencakup jenis laporan dan elemen informasi

yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapatkan perhatian

2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (3) tentang Standar akuntansi pemerintahan didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (3) tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah.

Sistem akuntansi yang diimplementasikan pemerintah daerah memiliki keterkaitan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan. Sistem akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan standar akuntansi merupakan pedoman yang mengatur bagaimana laporan keuangan tersebut seharusnya disajikan. Standar akuntansi pemerintahan mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana melaporkannya. Pemerintah pada bulan juni 2005 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Kemudian diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyajikan laporan

keuangan. Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan fundamental Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan.

Dalam PP No.71 Tahun 2010 yang didukung dengan disahkannya Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang penyajian laporan keuangan berbasis akrual, maka transaksi akan dicatat ke dalam 2 jenis jurnal, yaitu:

1. Jurnal Finansial untuk mencatat kegiatan yang berpengaruh pada akun belanja, rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah dan kas di bendahara pengeluaran yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran
2. Jurnal Anggaran untuk mencatat seluruh kegiatan operasional yang bersumber dari anggaran (APBD) selama periode tertentu yang berpengaruh pada akun beban dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih yang akan menghasilkan laporan operasional.

Dalam PP No. 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. PP No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 memiliki dua buah lampiran, lampiran I merupakan standar akuntansi berbasis akrual dan lampiran II merupakan standar akuntansi berbasis kas menuju akrual. Perbedaan mendasarnya terletak pada PSAP 12 mengenai laporan operasional yang hanya terdapat di dalam lampiran I. Entitas melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan yang bersangkutan.

Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 terdiri dari :

- a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- b. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
- c. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- d. PSAP 03 Laporan Arus Kas
- e. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
- f. PSAP 05 Akuntansi Persediaan
- g. PSAP 06 Akuntansi Investasi
- h. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap

i. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

j. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban

k. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

l. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

m. PSAP 12 Laporan Operasional

Dengan demikian SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah.

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP.

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai hal tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.¹⁰

2.3.1 Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP. Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.3.2 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah

¹⁰ Zeyn, Elvira, **Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan**, Trikonomika 10 (Juni 2011), hal 53.

Berdasarkan penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Basis AkruaI dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.

Tujuan standar akuntansi pemerintahan adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding (*comparability*). Sehingga dengan adanya standar akuntansi pemerintahan, maka pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas serta dengan adanya standar akuntansi pemerintahan dapat digunakan sebagai perbandingan kerja antar kurun waktu/periode dan dengan pemerintah daerah lainnya.

Bagi auditor pun dengan adanya standar akuntansi pemerintahan akan mempermudah proses audit, karena pada dasarnya audit adalah memeriksa laporan keuangan yang merupakan asersi manajemen dikaitkan kesesuaiannya dengan standar akuntansi pemerintahan yang sudah ditetapkan.

2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Baik buruknya pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan dengan laporan keuangan yang berkualitas sebagai gambaran apakah kepala daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan telah melaksanakan kegiatan dalam lingkup pemerintahan daerah sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Kualitas menurut Goesth dan Davis

sebagaimana dikutip oleh Tjiptono sebagai “suatu kondisi dinamis dimana yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. Mulya mendefenisikan Kualitas sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Jadi kualitas dapat merujuk pada pengertian pemenuhan standar atau persyaratan tertentu yang mana hal tersebut dinilai melalui hasil pertanggungjawaban suatu entitas, baik dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

Dalam Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 35 menjelaskan bahwa “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.”¹¹ Terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, antara lain:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

¹¹ PP No. 71 tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 35

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

Informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

- b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut

secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik;

1. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang

lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.5 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITIAN TERDAHULU	HASIL PENLITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Judul: Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual.	Menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah kota manado dalam impelementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut	Menganalisis penerapan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.	Objek: Pada Pemerinatah Kota Manado. Dan Menggunakan pendekatan interpretatif

<p>Penulis: Sampel, Kalangi, dan Runtu (2015). Metode: Kualitatif dengan pendekatan interpretive. Sumber: Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1</p>	<p>didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Manado dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Kompleksitas laporan keuangan menjadi factor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah Kota Manado dalam impelementasi SAP berbasis akrual. Sedangkan dari sisi budaya organisasi, pemerintah Kota Manado Diwajibkan</p>		
--	--	--	--

		<p>menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sebaiknya perlu diadakan kembali sosialisasi dan bimbingan teknis oleh pemerintah pusat kepada SKPD terkait.</p>		
2	<p>Judul: Analisis Kesiapan Penerapan Standa Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan</p>	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DPPKBMD selaku pengelola keuangan daerah Kota Tomohon belum memiliki kesiapan dalam penerapan SAP berbasis akrual. Selain itu peran DPPKBMD sebagai</p>	<p>Menganalisis penerapan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.</p>	<p>Objek: Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Analisisnya menggunakan deskriptif</p>

	<p>Barang Milik Daerah Kota Tomohon Penulis: Sitorus, Kalangi, dan Walandouw (2015). Metode: Analisis deskriptif interpretatif Sumber: Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1</p>	<p>SKPKD masih memiliki hambatan yaitu penempatan SDM yang tidak tepat sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Sebaliknya pimpinan Kota Tomohon menyiapkan SDM yang tepat dibidang akuntansi agar hambatanhambatan yang terjadi terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual dapat diminimalisir.</p>		interpretatif.
3	<p>Judul: Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual</p>	<p>Menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bitung sebagai salah satu entitas pelaporan, dan</p>	<p>Menganalisis penerapan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar</p>	<p>Objek: Pada Pemerintah Kota Bitung dan menggunakan</p>

	<p>Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung.</p> <p>Penulis: Langelo, Saerang, Alexander (2015)</p> <p>Metode: Analisis deskriptif interpretatif</p> <p>Sumber: Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1</p>	<p>menyajikan laporan keuangannya masih berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005</p> <p>berbasis CTA (Cash Toward Acrual) dan/atau Berbasis Kas menuju Akrual</p>	<p>Akuntansi Pemerintahan.</p>	<p>metode deskriptif interpretatif</p>
4	<p>Judul : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian</p>	<p>Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat ditarik garis besarnya bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi,</p>	<p>Menganalisis penerapan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan Kualitas Laporan</p>	<p>Objek: Pada Pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan. Dan metode deskriptif iterpretatif.</p>

	<p>Internal Terhadap Kualitas Laporan SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan.</p> <p>Penulis: Astika Rahmawati, I Wayan Mustika dan Lilik Handaya Eka (2018)</p> <p>Metode:</p>	<p>dan sistem pengendalian intern menunjukkan hasil yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</p>	Keuangan.	
5	<p>Judul : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota</p>	<p>Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian juga memberikan bukti bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh</p>	<p>Menganalisis penerapan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Serta Kualitas Laporan Keuangan.</p>	<p>Objek: Pada Pemerintah daerah Kota Tual. Dan metode deskriptif iterpretatif.</p>

Tual)	terhadap Kualitas		
Penulis :	Laporan Keuangan.		
Daniel Kartika Adhi			
dan Yohanes			
Suhardjo (2013)			
Metode Penelitian:			
deskriptif iterpretatif			

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan studi literatur. Pendekatan kualitatif desainnya bersifat umum, dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Metode ini disebut juga dengan metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Desain penelitian kualitatif biasanya bersifat global dan sangat fleksibel. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mencari dan memperoleh informasi yang mendalam dari banyaknya informasi yang ada. Penelitian kualitatif ini juga menekankan pada proses penelitian dan pemahaman masalah pencatatan, pelaporan, penyajian laporan keuangan pemerintahan serta kualitas laporan keuangan tersebut. Dengan demikian desain hanya digunakan sebagai asumsi untuk melakukan penelitian, oleh karena itu desain pada penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan terbuka.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini adalah penelitian kualitatif non interaktif atau bisa disebut penelitian analitis atau studi literatur/ pustaka. Penelitian non interaktif dilakukan dengan melakukan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung dapat diamati.

3.2 Metode dan Teknik Penelitian

3.2.1 Metode Deskriptif

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, karena pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Studi deskriptif yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap penelitian.

3.2.2 Studi Literatur

Studi literatur adalah teknik atau metode yang dilakukan dengan cara meneliti dan memahami buku-buku, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan atau berhubungan dengan permasalahan penelitian untuk memperoleh wawasan dan dasar teori sehingga bisa digunakan sebagai informasi untuk menganalisis serta menunjang pembahasan masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan melalui buku, jurnal, internet, atau sumber lain yang telah ada untuk diteliti.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian adalah berupa tekstual atau konsep-konsep. Karena dalam penelitian ini sebagaimana telah disebutkan di atas termasuk kedalam jenis studi literatur. Dengan demikian aspek-aspek yang dianalisis peneliti meliputi definisi, konsep, pandangan, pemikiran dan argumentasi yang terdapat dalam literatur yang relevan dengan pembahasan. Adapun untuk data-data yang disiapkan dalam penelitian ini adalah yang bersumber dari literatur atau menggunakan cara *library research* dengan tujuan mengumpulkan data informasi dengan bantuan bermacam-macam material.

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2007) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung. Yang meliputi Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen yang ditulis oleh orang lain. Sumber data sekunder akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas tinggi. Dalam penelitian sumber sekunder merupakan buku-buku penunjang yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan

sebaiknya, sehingga hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi literatur atau kepustakaan. Oleh karena itu peneliti melakukan proses pengumpulan data berupa dokumen atau buku-buku terkait dengan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, terdapat empat jenis teknik pengumpulan data kualitatif yang dapat dilakukan peneliti, yaitu:

a. Wawancara

Yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau informan terkait topik penelitian secara langsung. Teknik ini digunakan ketika peneliti ingin mengetahui pengalaman atau pendapat informan mengenai sesuatu secara mendalam.

b. Observasi

Yaitu teknik penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan pengindraan. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail mengenai suatu peristiwa atau kejadian.

c. *Focus Group Discussion (FGD)*

Yaitu teknik pengumpulan data kualitatif dimana peneliti melakukan diskusi bersama beberapa responden mengenai topik penelitian untuk mengetahui pandangan atau

pemahaman mereka. FGD dilakukan ketika peneliti ingin mengetahui pandangan yang lebih objektif dari suatu kelompok.

d. Studi Dokumen

Yaitu teknik pengumpulan data kualitatif dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik dan masalah penelitian.

Penggunaan kata data dalam penelitian kualitatif yang dimaksudkan adalah segala informasi yang tertulis, berupa buku, jurnal, gambar/ arsip foto dan lain-lain yang berkontribusi untuk menjawab masalah penelitian sebagaimana dinyatakan dalam rumusan masalah. Maka dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Data terkait masalah yang dikumpulkan akan di pelajari dan peneliti perlu membaca hasilhasil dari penelitian sebelumnya yang sejenis dan terkait dengan masalah yang diteliti, yang akan menambah kecakapan peneliti.

3.5 Metode Analisis Data

Setelah melakukan proses pengumpulan data maka peneliti melakukan tahapan selanjutnya yaitu analisis data. Analisa data dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisa konten atau isi dari sebuah buku atau jurnal. Penelitian ini bersifat pembahasan isi atau informasi tertulis dalam media massa atau internet. Dengan demikian peneliti dalam metode ini menganalisa berdasarkan kajian tekstual yang ada dalam literatur.

Jadi dapat dijelaskan bahwa penelitian literatur ini akan dimulai dengan melakukan pengumpulan data-data. Data-data yang dikumpulkan yaitu mengenai materi yang akan dibahas, yaitu data mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71

tahun 2010, Laporan keuangan pemerintahan serta karakteristik kualitatif laporan keuangan. Setelah itu, maka akan dilakukan pengkajian terhadap konsep apa yang digambarkan atau dijelaskan dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, serta data-data lain yang sudah dikumpulkan itu. Kemudian hasil dari telaah konsep tersebut akan dianalisis berdasarkan kesesuaiannya di lapangan. Dengan demikian hasil penelitian yang secara sekuensi dapat diperhatikan dari yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan dan menggambarkan hasil dan kesimpulan. Cara lain dapat juga dilakukan, misalnya dengan melihat tahun penelitian diawali dari yang paling muktahir, dan berangsur-angsur mundur ke tahun yang lebih lama. Membaca abstrak dari setiap penelitian lebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam penelitian. Mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian, untuk menjaga tidak terjebak dalam unsur plagiat, para peneliti hendaknya juga mencatat sumber-sumber informasi dan mencantumkan daftar pustaka.

